

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem demokrasi, suatu bangsa seringkali dihadapkan pada peristiwa politik dan kepentingan yang pada akhirnya muncul sebagai konflik. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi aspek politik semata, tetapi juga mencakup perkembangan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam ranah olahraga, khususnya sepakbola. Tidaklah mengherankan bahwa sepakbola, sebagai salah satu bagian dari ranah hiburan yang melibatkan aspek ekonomi, teknologi-informasi, dan hiburan, juga terdampak oleh dinamika politik.¹

Sepakbola, dengan jumlah penggemar yang sangat besar, menjadi arena strategis bagi para calon pemangku kebijakan publik yang berupaya memperoleh dukungan masyarakat.² Keberadaan penggemar yang masif menjadi ladang subur bagi pihak-pihak yang ingin mendekatkan diri dengan publik melalui keterlibatan dalam dunia sepakbola. Oleh karena itu, hubungan antara sepakbola dan politik tidak dapat diabaikan. Melalui keterlibatan dalam sepakbola, para pemangku kebijakan dapat memanfaatkan popularitas dan dampak sosial yang dimiliki oleh olahraga ini untuk membangun opini dan dukungan masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bagaimana dinamika politik dapat merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya dunia olahraga seperti sepakbola.³

Di Indonesia, otoritas tertinggi dalam organisasi sepakbola berada di tangan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). PSSI berperan sebagai entitas independen yang terafiliasi dengan FIFA, organisasi sepakbola internasional. Segala kegiatan yang dilakukan oleh PSSI diatur oleh statuta FIFA,

¹ Athalarik, F. M., & Rusadi, U. (2023). *Sepak Bola Indonesia dalam Perspektif Komodifikasi Budaya Populer*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 25476–25487.

² Perdana, K. E. (2018). *Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VIII (2).

³ Triyono, S. (2008). *Dinamika Sepakbola Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

khususnya Pasal 14 yang mengamanatkan kebebasan dari intervensi pihak ketiga bagi anggotanya.⁴

PSSI sebagai entitas independen di bawah naungan FIFA, seharusnya tidak terlibat dalam campur tangan atau keterlibatan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan statuta FIFA Pasal 14. Namun, pada kenyataannya, PSSI sebagai organisasi independen kerap menjadi sumber konflik yang sarat dengan berbagai kepentingan, terutama dari segi politik. Dinamika konflik ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara organisasi sepakbola nasional dengan beragam pihak yang memiliki kepentingan berbeda.⁵

Seiring berjalan waktu, terjadi perubahan dalam dinamika konflik dan peristiwa politik di internal PSSI. Pada pertengahan tahun 2010-an, konflik yang muncul terkait dengan campur tangan dan peran sentral pemerintah dalam pengelolaan PSSI. Masa kepemimpinan Andi Mallarangeng dan Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada periode tersebut berkontribusi pada PSSI menghadapi sanksi berupa pembekuan karena dinilai merugikan kemandirian organisasi. Hukuman pembekuan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan sepakbola Indonesia, dimana seluruh kegiatan sepakbola di bawah naungan PSSI tidak dapat mengikuti jadwal resmi kompetisi yang diatur oleh FIFA.⁶

Pembekuan PSSI, yang dijatuhkan sebagai konsekuensi dari campur tangan pemerintah, memiliki implikasi yang cukup serius bagi perkembangan sepakbola nasional. Keterlibatan dalam kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh FIFA menjadi terbatas dan menghambat partisipasi aktif Indonesia dalam arena sepakbola internasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh federasi sepakbola itu sendiri, tetapi juga mencakup dampak negatif terhadap pemain, klub, dan seluruh ekosistem sepakbola di Indonesia.⁷ Penting untuk dicatat bahwa selama masa pembekuan, sejumlah turnamen dan kegiatan sepakbola nasional

⁴ FIFA, *Statuta FIFA 2019*

⁵ Lesmana, T. (2013). *Bola Politik Dan Politik Bola: Kemana Arah Tendangannya?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁶ Ulhaq, A. D. (2013). *Olahraga Dan Politik Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Konflik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁷ Athalarik, F. M., & Rusadi, U. (2023). *Sepak Bola Indonesia dalam Perspektif Komodifikasi Budaya Populer*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25476–25487.

harus dihentikan atau ditiadakan, menghambat pengembangan bakat, pertumbuhan industri sepakbola, dan citra positif Indonesia di panggung dunia olahraga internasional.

Berbeda dengan peristiwa politik pada periode sebelumnya, di mana konflik melibatkan intervensi dari pemerintah dan FIFA terhadap PSSI, saat ini terjadi fenomena politik di mana aktor politik disinyalir menggunakan posisi Ketua Umum PSSI sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas di kalangan masyarakat. Jabatan Ketua Umum PSSI menjadi pusat perhatian dari berbagai segmen, termasuk masyarakat umum, pejabat pemerintah, media massa, dan pelaku bisnis. Belakangan ini, terdapat kecenderungan bahwa jabatan Ketua Umum PSSI bukan hanya menjadi tanggung jawab terkait pengelolaan organisasi sepakbola, tetapi juga dianggap sebagai kendaraan politik yang dapat memberikan keuntungan dalam kancah politik nasional. Keterlibatan aktor politik dalam kepemimpinan PSSI menjadi sorotan karena dianggap memiliki pengaruh yang langsung berkaitan dengan kesukaan masyarakat.

Jabatan Ketua Umum PSSI saat ini menjadi fokus perhatian yang intens dari berbagai pihak, mencakup masyarakat umum, pejabat pemerintah yang berkaitan dengan olahraga, pelaku media massa yang meliput berita olahraga, dan pemangku kepentingan bisnis yang memiliki investasi dalam industri sepakbola. Dengan demikian, dinamika politik terkini dalam konteks PSSI menciptakan ketertarikan yang signifikan dari elit politik.

Pada substansi dasarnya, politik selalu terhubung dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat secara luas, dan pemanfaatan kekuasaan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi individu atau kelompok lainnya. Menurut definisi J. M. Barbalet, "*power is the capacity of some person to produce intended and foreseen effects on other*" yang mengindikasikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan efek yang diinginkan dan diperkirakan pada orang lain.⁸ Dalam konteks sepakbola dan politik, fenomena terkini menunjukkan bahwa olahraga ini sering dijadikan sebagai alat untuk

⁸ Barbalet, J. M. (1985). *Power and Resistance*. The British Journal of Sociology, 36(4), 531–548. <https://doi.org/10.2307/590330>

memperoleh dukungan dari pelaku politik dengan tujuan mencapai posisi kekuasaan, dan mendapatkan dukungan massa untuk mencapai berbagai tujuan politik. Hal ini berlaku tidak hanya untuk calon-calon kepala daerah, tetapi juga di tingkat nasional, di mana upaya dilakukan untuk memperoleh dukungan melalui perpolitikan sepakbola dengan melibatkan kerumunan massa. Salah satu strategi yang umum dilakukan adalah mempolitisasi sepak bola dan menggunakannya sebagai modal sosial,⁹ serupa dengan pendekatan yang diterapkan pada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Dengan demikian, olahraga sepakbola menjadi alat politik yang digunakan untuk menggalang dukungan massal, memperkuat popularitas, dan meraih suara dalam konteks pemilihan umum. Strategi ini memperlihatkan bahwa sepak bola tidak hanya memiliki dimensi hiburan dan olahraga semata, tetapi juga menjadi arena tempat bercampurnya kepentingan politik dalam mencapai tujuan tertentu.

Politik dalam konteks olahraga di Indonesia tidak hanya terbatas pada PSSI, tetapi juga melibatkan klub-klub liga yang dimiliki oleh elit politik, dengan tujuan mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat di wilayah pemilihan mereka. Salah satu contoh dalam konteks lokal adalah keberadaan klub Persiraja, yang berlokasi di ibukota Provinsi Aceh. Nama "Persiraja" berasal dari nama alternatif untuk Kota Banda Aceh, yaitu Kutaraja. Klub Persiraja didirikan pada tanggal 28 Juli 1957 dan dikenal dengan julukan "Lantak Laju" dan "Laskar Rencong". Sejarah Persiraja menunjukkan bahwa eksistensinya semakin berkembang ketika klub ini dibeli oleh Nazaruddin "Dek Gam" dari pemerintah Kota Banda Aceh. Keterkaitan erat antara sosok Nazaruddin "Dek Gam" dengan Persiraja tidak dapat dipisahkan, karena kehadiran tersebut membawa dampak positif terhadap prestasi klub. Kehadiran pemilik klub yang memiliki keterkaitan politik ini turut berperan dalam meningkatkan performa dan pencapaian Persiraja dalam dunia sepakbola.¹⁰

⁹ Baskara, N. A., Yuwanto, & Ardianto, H. T. (2019). *Sepak bola dan politik: mobilisasi suporter PSIS untuk kemenangan Yoyok Sukawi dalam pemilihan legislatif tahun 2019*. Universitas Diponegoro.

¹⁰ Abizar, Z., & Ahmady, S.IP., M.IP., I. (2022). *Pengaruh Politik Dalam Permainan Sepakbola (Studi Kasus Kemenangan Nazaruddin (Dek Gam) Pada Pemilu Legislatif 2019)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 07(04).

Pada saat ini, Persiraja memiliki seorang presiden yang dikenal dengan nama Nazaruddin atau akrab dipanggil "Dek Gam". Hingga kini, kepemilikan sepenuhnya atas klub Persiraja tetap berada di tangan H. Nazaruddin (Dek Gam). Nazaruddin Dek Gam sebelumnya melakukan perpindahan kedua kalinya dalam arena politik praktis, beralih dari Partai PKBI ke Partai PAN. Kedua kali perpindahan ini dilakukan dengan memanfaatkan identitas etnonasionalisme di Aceh, di mana keterlibatannya dalam sepakbola digunakan sebagai elemen kunci. Ketika dihubungkan dengan kemenangan Nazaruddin Dek Gam, dapat dilihat bahwa latar belakangnya yang erat dengan dunia olahraga memberikan dampak signifikan. Mayoritas dukungan yang diterimanya berasal dari kalangan kaum muda progresif, yang secara positif mempengaruhi hasil suara yang diperoleh oleh Nazaruddin Dek Gam. Nazaruddin Dek Gam menjabat sebagai presiden Klub Sepakbola Persiraja Banda Aceh, dan melalui pencalonan dari Partai PAN, berhasil meraih suara tertinggi sebanyak 93.353 suara dalam Pemilihan Umum 2019 menurut data KPU. Komunikasi yang efektif antara Nazaruddin dan Klub Persiraja menjadi elemen krusial yang turut berkontribusi pada kesuksesan politiknya. Dalam konteks ini, pentingnya pelaksanaan komunikasi yang tepat menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan politik, khususnya terkait dengan peningkatan popularitas dan dukungan di kalangan penggemar sepakbola, menjadi elemen kunci dalam meraih kemenangan politik.¹¹

Dalam situasi lain, muncul kontroversi seputar Edy Rahmayadi akibat rangkap jabatannya sebagai Ketua PSSI dan Gubernur Sumatera Utara yang diemban secara bersamaan. Edy, yang memegang posisi sebagai Ketua PSSI sejak 10 November 2016, dituduh memanfaatkan organisasi sepakbola tersebut sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hal ini mencerminkan pola yang sering terjadi di kalangan elit politik, di mana beberapa nama lain juga terkait erat dengan pemanfaatan organisasi non-pemerintahan demi kepentingan politik praktis mereka.¹²

¹¹ *Ibid*

¹² Hardani, R. (2019). *Rangkap Jabatan Ketua Umum Persatuan sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan sepakbola Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem keolahragaan Nasional*. Universitas Singaperbangsa Karawang.

Menurut hasil penelitian dari Nielsen Sport pada tahun 2016, sebanyak 77% penduduk Indonesia menunjukkan minat terhadap sepak bola (Nielsen Sport, 2016).¹³ Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat kedua di dunia sebagai negara dengan jumlah penggemar sepak bola terbesar, setelah Nigeria. Dengan adanya jumlah peminat sepak bola yang signifikan, ini menjadi suatu keunggulan bagi pihak-pihak yang ingin meningkatkan popularitas mereka. Keinginan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan kejayaan sepak bola dalam negeri dapat dianggap sebagai target yang dapat dimanfaatkan oleh para politisi. Oleh karena itu, PSSI, sebagai lembaga pengelola sepak bola nasional, sering kali menjadi objek persaingan antara berbagai pihak dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hal tersebut memberikan ketertarikan terhadap penulis dalam meneliti hal di atas. Karena lambat laun PSSI sebagai badan otoritas tertinggi sepakbola di Indonesia beralih fungsi menjadi kendaraan politik para politisi untuk meraih tahta. Jabatan Ketua umum PSSI sejatinya akan mendapatkan sorotan secara nasional tanpa dapat diawasi oleh pihak manapun. Hal ini menjadi fokus penelitian pada fenomena jabatan Ketua Umum PSSI sebagai kendaraan popularitas politik periode 2016-2022.

Perkembangan politik Indonesia pasca reformasi mengalami perubahan yang signifikan. Mekanisme pengambilan suara *1 voice 1 vote* dalam Pemilihan Umum (Pemilu) turut memengaruhi iklim politik di Indonesia. Situasi ini yang kemudian menjadikan tiap calon pejabat berlomba-lomba untuk meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Berbagai cara dilakukan demi meraup suara terbanyak dalam kontestasi 5 tahunan tersebut.¹⁴

Tak terkecuali melalui jabatan organisasi non-pemerintahan yang populer seperti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sejak periode 2016-2022, jabatan tertinggi PSSI, yaitu Ketua Umum sangat bersinggungan dengan elit dan kepentingan politik praktis. Sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penggemar sepakbola hingga 77% (Nielsen Sport, 2016), maka akan sulit rasanya

¹³ Nielsen Sport. (2016). *Indonesia Penggemar Bola Nomor Dua di Dunia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/1>

¹⁴ Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Miriam Budiardjo (Cet. Ke-26)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

mengabaikan jabatan Ketua Umum PSSI sebagai salah satu variable penting untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan jabatan Ketua Umum PSSI terhadap popularitas dan elektabilitas politik?
2. Apa yang menjadi daya tarik jabatan Ketua Umum PSSI untuk dijadikan sebagai kendaraan politik?
3. Apakah instrumen yang dimiliki PSSI dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas politik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan di atas maka yang jadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh jabatan Ketua Umum PSSI terhadap popularitas dan elektabilitas politik.
2. Mengetahui daya tarik jabatan Ketua Umum PSSI sebagai kendaraan politik.
3. Mengetahui penggunaan instrumen organisasi PSSI sebagai alat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas politik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis membagi manfaat dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman pada dunia pendidikan dan masyarakat umum, serta mengisi kajian ilmu politik terkait elit perpolitikan yang terlibat dalam ranah sepakbola di Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat membuka perspektif baru dan mendalam terhadap dinamika hubungan antara politik dan sepakbola, memberikan pemahaman yang lebih

mendalam terhadap peran elit politik dalam olahraga, serta menjadi sumbangan berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi sumber referensi yang berguna dalam kajian ilmu politik, baik di lingkungan pendidikan maupun bagi masyarakat umum. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait perpolitikan dan dinamika organisasi keolahragaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan berguna dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di tingkat praktis.

1.5 Sistematika Tulisan

Dalam rangka mendalaminya pemahaman terhadap konteks yang disampaikan dalam penelitian ini, penulis telah menyusun suatu kerangka acuan dalam bentuk sistematika penulisan skripsi. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci pada setiap bab penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini mencakup langkah-langkah dan struktur yang teliti, memberikan panduan bagi pembaca untuk memahami secara menyeluruh konten penelitian yang terkandung dalam skripsi ini. Penyusunan sistematika penulisan ini dilakukan dengan penuh perhatian, sehingga memastikan setiap bab dapat diikuti dengan runtut dan terstruktur dengan baik.

Bab Satu berfokus pada pendahuluan yang mencakup beberapa aspek esensial. Pertama-tama, latar belakang masalah penelitian diperkenalkan oleh penulis untuk memberikan gambaran tentang sejarah konflik yang melibatkan struktur organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan aktor politik. Dalam konteks ini, penulis membahas secara rinci bagaimana konflik tersebut telah berkembang seiring waktu. Fenomena selanjutnya yang menjadi sorotan penulis adalah penggunaan kursi jabatan Ketua Umum PSSI sebagai alat politik yang dimanfaatkan oleh segelintir elit dengan kepentingan politik. Penulis menggambarkan

bagaimana olahraga, khususnya sepak bola, menjadi sarana yang digunakan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas seseorang dalam pemilihan umum. Penulisan dilanjutkan dengan penguraian rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, penulis menjelaskan tujuan penelitian, yang memberikan pandangan terperinci tentang hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

Penelitian kemudian lanjut ke Bab Dua, yaitu terkait dengan kajian Pustaka yang membahas tinjauan pustaka secara rinci dan mencakup ulasan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari ulasan ini adalah untuk menyediakan landasan perbandingan yang kuat dalam membentuk batasan masalah. Di samping itu, bab ini juga memaparkan kerangka teori yang menjadi landasan bagi penulis dalam memahami serta menganalisis permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Kerangka berpikir pada bagian ini menjelaskan secara detail garis besar alur pemikiran, dengan penegasan kuat melalui pemanfaatan teori sebagai dasar dari kegiatan penelitian ini. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, bab ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang perkembangan pemikiran sehubungan dengan penelitian ini.

Selanjutnya masuk ke Bab Tiga membahas metode penelitian secara komprehensif mengulas pendekatan penelitian yang diambil, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti untuk menghasilkan temuan penelitian. Dalam bab ini, penulis merinci kerangka kerja penelitian yang menjadi landasan utama, termasuk strategi pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan keseluruhan metodologi yang terstruktur. Dengan mendalamnya pembahasan, bab ini bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai pendekatan dan langkah-langkah metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini.

Bab Empat akan menyajikan gambaran umum mengenai sejarah kepemimpinan dan struktur organisasi PSSI, mencakup periode historis

hingga dinamika politik yang muncul dalam beberapa periode terakhir. Penulis akan melampirkan hasil penelitian sebagai temuan berdasarkan rumusan masalah dalam proposal penelitian. Data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial sebagai dasar penelitian, menjelaskan situasi pemanfaatan media sebagai *marketing* politik dan perkembangan terkini dalam konteks elit politik dan organisasi PSSI.

Penelitian ditutup dan disimpulkan pada Bab Lima yang berfungsi sebagai penutup atau bagian akhir pembahasan yang akan menyajikan rangkuman kesimpulan dan rekomendasi dalam konteks penelitian ini. Selain itu, bab ini akan memberikan gambaran keseluruhan hasil penelitian, memberikan interpretasi yang jelas terhadap temuan, dan mengajukan saran-saran yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan. Pada bagian akhir skripsi ini, disertakan Daftar Pustaka, Daftar Lampiran, dan Daftar Skrip Wawancara.

